Prof. Dr. Boediono



EKONOMIA

DALAM LINTASAN SEJARAH

"Referensi penting bagi setiap orang yang ingin memahami perjalanan perekonomian bangsa. Tajam karena didasari pengalaman konkret merencanakan dan mengelola negara. Mendalam karena latar belakang penulis sebagai akademisi yang dikenal cermat dan rasional."

—Najwa Shihab, Jurnalis Televisi

Versi Pdf Lengkannya di inusnas com

EKONEML





DALAM LINTASAN SEJARAH

Prof. Dr. Boediono



EKONOMI INDONESIA: DALAM LINTASAN SEJARAH

© copyright Prof. Dr. Boediono, 2016

Penyunting: Esti A. Budihabsari

Proofreader: Eti Rohaeti

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Cetakan I. Juni 2016

Diterbitkan oleh Penerbit Mizan

PT Mizan Pustaka

Anggota IKAPI

Jln. Cinambo No. 135 (Cisaranten Wetan),

Ujungberung, Bandung 40294

Telp. (022) 7834310 - Faks. (022) 7834311

e-mail: kronik@mizan.com

http://www.mizan.com

facebook: Penerbit Mizan twitter: @penerbitmizan

Desainer sampul: Andreas Kusumahadi Foto sampul © Yuliani Liputo

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Boediono

Ekonomi Indonesia: dalam lintasan sejarah/Boediono; penyunting, Esti A. Budihabsari.—Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.

312 hlm.; 23,5 cm

ISBN 978-979-433-947-3

1. Indonesia—Keadaan ekonomi I. Judul.

II. Esti A. Budihabsari.

330.9598

Didistribusikan oleh Mizan Media Utama (MMU) Jln. Cinambo No. 146 (Cisaranten Wetan), Ujungberung, Bandung 40294 Telp. (022) 7815500 - Faks. (022) 7834244

e-mail: mmubdg@mizanmediautama.com

facebook: Mizan Media Utama twitter: @mizanmediautama Perwakilan:

Jakarta: (021) 7874455;

Surabaya: (031) 8281857; Medan (061) 8229583; Pekanbaru: (0761) 29811; Makassar: (0411) 440158;

> Yogyakarta: (0274) 889249; Banjarmasin: (0511) 3252178

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Mengenang Profesor Widjojo Nitisastro, salah seorang pengukir sejarah ekonomi Indonesia.



PRAKATA

Buku ini saya maksudkan bagi Anda yang ingin mengetahui secara garis besar perjalanan perekonomian Indonesia selama lima abad ini. Fokus utama memang pada masa setelah kemerdekaan. Tetapi saya berpendapat bahwa masa sebelumnya pun penting untuk dipelajari dan dimengerti agar kita mempunyai perspektif yang lebih baik mengenai apa yang terjadi sesudahnya, dan barangkali bahkan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Tidak bisa dihindari, beberapa konsep ekonomi teknis harus digunakan untuk menjelaskan proses yang terjadi. Sejauh bisa konsep-konsep ini diuraikan dalam bahasa sehari-hari.

Selain bagi pembaca umum, saya berharap buku ini bermanfaat sebagai sumber studi kasus bagi para mahasiswa yang sedang belajar atau mengambil mata kuliah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi bukanlah (meminjam kata sindiran orang) "kotak-kotak kosong" yang sekadar berisi kurva-kurva, persamaan-persamaan, atau dalildalil abstrak. Ilmu ekonomi adalah ilmu terapan—nilainya sebagai ilmu ditentukan oleh apakah ia bisa membantu memecahkan masalah riil yang dihadapi masyarakat. Saya berharap, dari buku ini dapat diperoleh contoh-contoh bagaimana ilmu ekonomi diterapkan untuk memecahkan masalah konkret yang dihadapi bangsa dari waktu ke waktu. Dan Anda akan jumpai bahwa adakalanya membawa hasil dan adakalanya gagal.

Sejarah memberikan pelajaran bagi mereka yang mau belajar darinya. Dan dari situ tumbuh kearifan.

Selamat membaca.

Jakarta, 25 Februari 2016

Boediono

EQUILIBRIUM EKONOMI Dan Politik

Komentar dari Prof. Dr. Emil Salim

etelah membentangkan perkembangan ekonomi Indonesia selama dasawarsa 2004-2014 yang terbagi atas empat episode berbeda-beda penuh dengan naik-turunnya gelombang pembangunan, *Prof. Dr. Boediono* menyimpulkan bahwa hakikat proses pembangunan adalah hasil interaksi proses ekonomi dan politik yang saling mempengaruhi secara timbal balik.

Ada masa ketika kekuatan politik dominan dan ekonomi tersubordinasikan di bawahnya, seperti di masa "Ekonomi Terpimpin" Orde Lama. Ada masa ketika kekuatan ekonomi dominan dan politik tersubordinasikan di bawahnya, seperti di permulaan masa Orde Baru.

Dalam proses pembangunan, sasaran politik pada suatu masa tidak selalu bersinergi dengan sasaran ekonomi pada waktu yang sama, para pemimpin pembangunan kita selalu dihadapkan pada trade off antara kedua sasaran tersebut. Sehingga, menurut Prof. Dr. Boediono, "Sejarah menunjukkan bahwa secara umum sasaran ekonomi tunduk pada sasaran politik. Tetapi pada masa-masa tertentu (misalnya, krisis ekonomi), sasaran ekonomi menempati urgensi tinggi dan mensubordinasi sasaran politik, paling tidak dalam jangka pendek sampai krisis diatasi. Sejarah juga menunjukkan bahwa apabila kesenjangan atau gap antara sasaran politik dan sasaran ekonomi terlalu lebar, kesulitan menanti negara. Penyesuaian

antara keduanya harus terjadi, dan itu bisa menyakitkan" (halaman 271-272).

Tesis penting Prof. Dr. Boediono adalah "Tugas pengelola negara adalah menjaga agar setiap saat kedua sasaran tersebut tidak melenceng terlalu jauh satu sama lain" (halaman 272).

Sejarah pembangunan negara bagaikan "bandul pembangunan" yang terayun antara dua tonggak, ekonomi dan politik. Ada suatu masa "bandul pembangunan" terayun lebih berat ke arah tonggak politik, sehingga pengaruh dan kekuatan politik lebih dominan daripada ekonomi. Hal inilah yang terjadi di "masa ekonomi terpimpin". Namun, ketika "bandul pembangunan" semakin jauh dari "tonggak ekonomi" dan semakin mendekati "tonggak politik", bangkitlah "kekuatan pembalikan" (countervailing forces) yang mendorong "bandul pembangunan" berbalik arah ke "tonggak ekonomi".

Maka, bagaikan bandul yang terayun antara dua tonggak ekonomi dan politik, sejarah pembangunan ekonomi berlangsung ditarik dan didorong oleh kekuatan yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat menuju *equilibrium*-nya yang pas antara aspirasi ekonomi dan aspirasi politik. Dinamika masyarakat mendorong proses berjalan mencari dan menuju *equilibrium* antara aspirasi ekonomi dan politik.

Dalam perumpamaan gambaran "bandul berayun antara tonggak ekonomi dan politik", bisa dikatakan bahwa pembangunan adalah "proses gerak bandul pembangunan menemukan zona equilibrium antara tonggak ekonomi dan politik". Kehidupan masyarakat bangsa bersifat dinamis, karena itu tidak akan tercapai "titik keseimbangan mutlak" yang terletak antara tonggak ekonomi dan politik.

Jika dalam proses pembangunan, masyarakat merasakan bahwa "bandul pembangunan" telah bergerak terlalu jauh dan timpang ke tonggak ekonomi atau politik pada kurun waktu tertentu dan meninggalkan zona *equilibrium* yang dipandang "patut dan wajar",

akan bangkit tumbuh "countervailing forces" yang mengoreksi posisi untuk kembali ke zona equilibrium.

Dalam dinamika proses pembangunan Indonesia sekarang, tugas pengelola negara adalah secara aktif menumbuhkan iklim kesempatan, membangkitkan daya mampu serta kecerdasan masyarakat untuk memahami dan membangun zona *equilibrium* antara tonggak ekonomi dan tonggak politik.

"Zona equilibrium" ini ditentukan oleh wujud aspirasi jati-diri bangsa yang disepakati dan harus ditemukan dalam UUD 1945 sebagai manifestasi kehendak bangsa untuk merdeka. Rumusan mukadimah UUD 1945 memuat dasar negara yang terangkum dalam Pancasila.

Maka sesungguhnya, *equilibrium* antara politik dan ekonomi ditentukan oleh manifestasi perwujudan Pancasila, yang menjadi tolok ukur bagi "ruang gerak politik" yang diseimbangkan dengan "ruang gerak ekonomi".

Oleh karena sejarah berkembang, sehingga yang relevan dengan masa lampau tidak lagi sesuai dengan perubahan zaman, ideologi Pancasila memerlukan proses penggalian pikiran kreatif agar tetap tumbuh relevan dengan semangat zaman yang berubah.

Dalam kaitan inilah, sangat relevan saran *Prof. Dr. Boediono* mengembangkan *homegrown institusi publik*, yang memuat "aturan main" dan "kapasitas manusia pelaksana aturan main" ini.

Dan kemudian mampu mengidentifikasi "zona equilibrium antara tatanan politik dan ekonomi" sebagai manifestasi salah satu wujud Pancasila mendorong pembangunan Indonesia ke tahap lepas landas di 2045.

Jakarta, 30 Mei 2016

Emil Salim (emilsalim2009@gmail.com)



ISI BUKU

| Prakata — / |
|--|
| Equilibrium Ekonomi dan Politik: Komentar |
| dari Prof. Dr. Emil Salim — 9 |
| |
| Daftar Kotak — 17 |
| Daftar Gambar — 19 |
| Daftar Tabel — 21 |
| BAGIAN SATU: MASA SEBELUM KEMERDEKAAN — 25 |
| BAB 1 Nusantara di Masa VOC: Abad 17 dan 18 — 27 |
| Kawasan Perdagangan Nusantara — 27 |
| Dari Monopoli Perdagangan ke Pemerintahan Kuasi — 31 |
| Dua Abad Bersama VOC — 35 |
| Bahan Renungan — 38 |
| Rangkuman — 41 |
| BAB 2 Membangun Sistem Ekonomi Kolonial: Abad 19 |
| dan Awal Abad 20 — 43 |
| Pemerintah Belanda Ambil Alih VOC — 43 |
| Membangun Sistem Pemerintahan Kolonial — 44 |
| Tahap Awal, 1800-1830 — 45 |
| Sistem Tanam Paksa, 1830-1870 — 48 |

Kebijakan Ekonomi Liberal, 1870-1933 — 51 Sistem Pemerintahan Kolonial Terbentuk — 53 Politik Etis, 1900-1930 — 56 Kesejahteraan Rakyat — 57 Bahan Renungan — 59 Rangkuman — 60

BAB 3 Dari Depresi Dunia ke Ekonomi Perang, 1929-1950 — 62

Badai Tiba — 62
Respons Kebijakan — 64
Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945 — 67
Masa Revolusi, 1945-1949 — 71
Kilas Balik — 74
Rangkuman — 77

BAGIAN DUA: MASA SETELAH KEMERDEKAAN — 81

BAB 4 Masa Konsolidasi, Stagnasi, dan Hiperinflasi, 1950-1965 — 83

Masa Demokrasi Parlementer, 1950-1957 — 83 Tantangan Ekonomi — 86 Masa Demokrasi Terpimpin, 1957-1965 — 94 Bahan Renungan — 105

BAB 5 Masa Stabilisasi Ekonomi, 1966-1968 — 107

Problema yang Dihadapi — 107 Menyiapkan Kondisi Politik — 108 Menyiapkan Program Ekonomi — 109 Persoalan-Persoalan yang Timbul — 119 Hasil Kebijakan — 124 Rangkuman — 127 Isi Вики 15

BAB 6 Pembangunan Ekonomi dan Rezeki Minyak, 1969-1981 — 129

Kilas Balik — 129

Dari Stabilisasi ke Pembangunan — 130

Pertumbuhan Ekonomi — 133

Perubahan Struktural — 146

Kemiskinan dan Kependudukan — 151

Rangkuman — 156

BAB 7 Melepaskan Ketergantungan pada Minyak, Membangun Sektor Non-Migas, 1982-1996 — 158

Alur Perkembangan Utama — 158

Kebijakan Gelombang Pertama, 1983-1985 — 159

Kebijakan Gelombang Kedua, 1986-1996 — 164

Apa Hasil-Hasilnya? — 168

Rangkuman — 178

BAB 8 Krisis Keuangan Asia:

Dampak dan Penanganannya, 1997-2004 — 180

Menjelang Krisis, Tidak Ada Lampu Merah yang Menyala — 180

Tahap Awal Krisis — 182

Program dengan IMF — 188

Mengapa Program Gagal — 191

Mengapa Krisis Makin Memburuk — 196

Perubahan Strategi — 199

Pelaksanaan Program — 203

Rangkuman — 214

BAB 9 Kebangkitan, Krisis, dan "Boom" Ekspor, 2004-2014 — 217

Kisah Dua Krisis — 217

Suasana Sebelum Krisis, 2004-2008 — 220

Krisis dan Penanganannya, 2008-2009 — 224

"Boom" Ekspor dan Sesudahnya, 2010-2014 — 239 Tantangan ke Depan — 248 Rangkuman — 265

BAB 10 Belajar dari Sejarah (1): Ekonomi, Politik, dan Institusi — 268

Ekonomi dan Politik: Dua Sisi Satu Mata Uang — 268 Membangun Institusi Publik — 274 Indonesia di Mata Lee Kuan Yew — 280

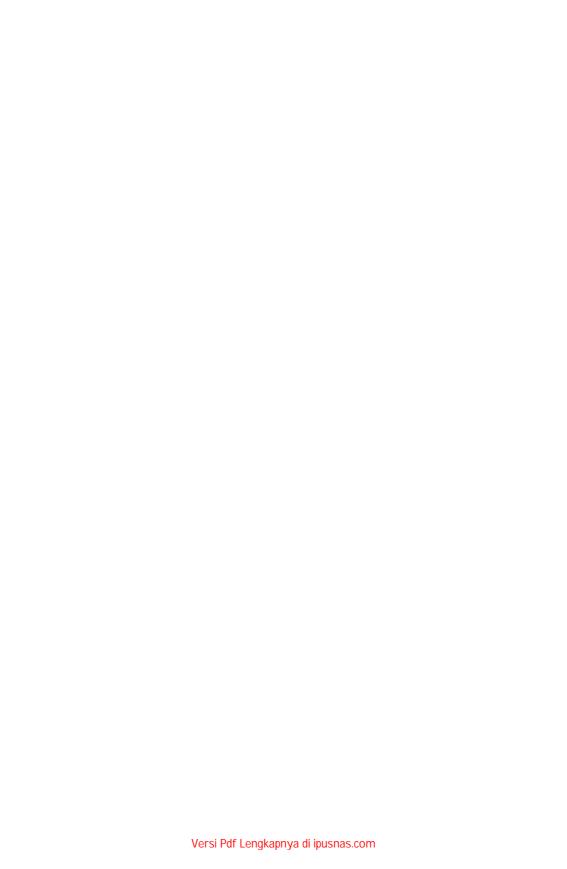
BAB 11 Belajar dari Sejarah (2): Menjaga Stabilitas dan Menangani Krisis di Era Globalisasi — 285

Sistem Pertahanan terhadap Gejolak Ekonomi — 285 Managing Financial Crisis: Some Lessons from the Indonesian Experience — 293

Kepustakaan — 299 Indeks — 305

DAFTAR KOTAK

| Kotak 1.1 | Seignorage — 30 |
|-----------|---|
| Kotak 1.2 | Sedikit Teori Ekonomi: Manfaat Perdagangan dan Pembagiannya — 34 |
| Kotak 2.1 | Sistem Ekonomi Komando — 50 |
| Kotak 5.1 | Prinsip "Anggaran Belanja Berimbang" — 113 |
| Kotak 5.2 | Sistem Kurs Devisa Ganda — 115 |
| Kotak 6.1 | Teknolog vs Teknokrat — 136 |
| Kotak 6.2 | Pengendalian Makro Sewaktu <i>Boom</i> Ekspor — 142 |
| Kotak 6.3 | Krisis Beras 1972/73 — 143 |
| Kotak 6.4 | Krisis Pertamina — 144 |
| Kotak 6.5 | Dari Mana Datangnya Pertumbuhan — 148 |
| Kotak 8.1 | Kebijakan Ekonomi dalam Praktik — 184 |
| Kotak 8.2 | Mekanisme Kerja Sama dengan IMF — 189 |
| Kotak 8.3 | Langkah Pembenahan Perbankan dan Hasilnya — 209 |
| Kotak 8.4 | Ringkasan Kronologi Penanganan Krisis — 212 |
| Kotak 9.1 | Kronologi Penanganan Bank Century — 236 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 9.1 Kurs Rupiah terhadap USD, 2008-2016 — 231

Gambar 9.2 Indeks Harga Komoditi Primer di Luar Bahan Bakar, 2000-2015 - 241



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ekspor Indonesia, 1874-1914 — 53

| Tabel 2.2 | Penghasilan Rata-Rata Rumah Tangga Menurut Kelompok Etnis, 1880-1925 — 58 |
|-----------|--|
| Tabel 3.1 | Harga Perdagangan Besar Komoditi Ekspor Utama Hindia Belanda, 1929-1932/34 — 64 |
| Tabel 3.2 | Produksi Beberapa Komoditi Penting, 1942-1945 — 70 |
| Tabel 3.3 | Kapasitas Produksi Beberapa Sektor Ekonomi sebagai Persentase dari Kapasitas Sebelum Perang, Sekitar 1947 — 72 |
| Tabel 4.1 | Kabinet di Masa Demokrasi Parlementer — 84 |
| Tabel 4.2 | Defisit APBN dan Uang Beredar, 1950-58 — 93 |
| Tabel 4.3 | Penerimaan dan Pengeluaran APBN Riil — 97 |
| Tabel 4.4 | Pos-Pos Pengeluaran Pemerintah yang Merupakan Prioritas Politik, 1958-1965 — 97 |
| Tabel 4.5 | Pengeluaran Prioritas Politik Dibanding dengan Pengeluaran Total APBN, 1958-1965 — 98 |
| Tabel 4.6 | Dukungan Dana untuk BUMN, 1958-1965 — 99 |
| Tabel 4.7 | APBN dan Uang Beredar, 1959-1966 — 100 |
| | |

- Tabel 4.8 Kenaikan Uang Beredar, Kenaikan Harga (Inflasi), dan Nilai Riil Uang Beredar, 1950-1966 102
- Tabel 4.9 Pertumbuhan Rata-Rata PDB Menurut Sektor dan PDB Per Kapita, 1949-1957 dan 1957-1966 104
- Tabel 4.10 PDB dan PDB Per Kapita, 1951-1967 104
- Tabel 5.1 Kenaikan Uang Beredar dan Penyebab Utamanya, 1964-1968 124
- Tabel 5.2 Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi, 1961-1971

 126
- Tabel 6.1 Pengeluaran Pembangunan dalam APBN, 1969 dan 1979 132
- Tabel 6.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor, 1967-1972 dan 1972-1980 133
- Tabel 6.3 Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan, 1969-1985 — 139
- Tabel 6.4 Produksi dan Impor Beras, 1970-1987 140
- Tabel 6.5 Komposisi PDB Indonesia, 1975-1985 146
- Tabel 6.6 Indeks Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Berbagai Sektor Ekonomi, 1971 dan 1980 148
- Tabel 6.7 Pertumbuhan Konsumsi Per Kapita Riil (pada Harga Konstan), 1969-1981 152
- Tabel 6.8 Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan, 1969/1970, 1976, dan 1981 153
- Tabel 6.9 Persentase Penduduk yang Tinggal di Perkotaan di Indonesia, 1930-2010 155
- Tabel 7.1 Ekspor Non-Migas dan Defisit Transaksi Berjalan, 1983-1996 — 169
- Tabel 7.2 Ekspor Non-Migas Utama, 1986 dan 1996 170

- Tabel 7.3 Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Disetujui dan Persentase Pengeluaran Investasi dalam PDB, 1983-1996 171
- Tabel 7.4 Perkembangan Kredit Perbankan, 1984-1996 172
- Tabel 7.5 Pertumbuhan PDB, PDB Per Kapita, dan Laju Inflasi, 1986-1996 173
- Tabel 7.6 Penerimaan Pajak Migas, Pajak Non-Migas sebagai Persentase Penerimaan Dalam Negeri APBN, 1984-1996

 174
- Tabel 9.1 Pertumbuhan Ekonomi di Masa Krisis Keuangan di Beberapa Negara Asia, 1996-2004 218
- Tabel 9.2 Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara Asia di Masa Krisis Keuangan Global, 2006-2010 219
- Tabel 9.3 Subsidi BBM, Defisit APBN, dan Transaksi Berjalan, 2004-2008 222
- Tabel 9.4 Dampak Kenaikan Harga Minyak pada APBN dan Transaksi Berjalan, 2009-2014 242
- Tabel 9.5 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Kelompok Usia Muda, 2004-2013 252
- Tabel 9.6 Penduduk Miskin dan Koefisien Gini, 1970-2013 256
- Tabel 9.7 Koefisien Gini: Perbandingan Antar Negara 258
- Tabel 9.8 Gejala Stunting di Beberapa Negara 259

